

# Jurnalisme Damai dan Peran Media Massa dalam Mengatasi Konflik di Indonesia

**Bend Abidin Santosa<sup>1</sup>**  
masbendekil@gmail.com

**Abstract:** Indonesia is one of the most religiously, culturally, and ethnically diverse society in the world, which is highly vulnerable to social conflict. This research aims to discuss how the principle of peaceful journalism can be one of alternative solution in overcoming and preventing social conflicts in Indonesia. Utilizing descriptive quantitative method and framing analysis based on agenda setting theory, this study stated that because of the ability of mass media in constructing reality and forming public opinion in the midst of people's life, especially when conveying various information and news about social conflict, the media is considered to have a significant role in dampening and overcoming the socio-religious conflicts that occur in Indonesia.

**Keywords:** Role of mass media, conflict, agenda setting, , peace journalism

**Abstrak:** Indonesia merupakan negara yang memiliki suku, agama, dan ras yang beraneka ragam, yang cukup berpotensi munculnya kerentanan konflik sosial. Penelitian ini bertujuan membahas bagaimana prinsip jurnalisme damai menjadi salah satu alternatif solusi dalam meredam konflik di Indonesia. Dengan menggunakan metode riset diskriptif kualitatif dan analisis framing dengan berdasarkan teori *agenda setting*, studi ini menyatakan bahwa kemampuan media massa dalam mengkonstruksi realitas serta membentuk opini publik di tengah-tengah kehidupan masyarakat saat, khususnya saat menyampaikan berbagai informasi serta nilai-nilai perdamaian, maka media massa dianggap mempunyai peran yang signifikan dalam karena meredam dan mengatasi konflik sosial-agama yang terjadi dalam masyarakat Indonesia.

**Kata Kunci:** Peran media massa, konflik sosial, agenda setting, jurnalisme damai

---

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Komunikasi Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara multi etnis yang memiliki aneka ragam suku, budaya, bahasa, dan agama bersatu di bawah semboyan Bhineka Tunggal Ika, namun adakalanya tidak demikian halnya dalam kenyataan. Keanekaragaman dan perbedaan itu merupakan potensi terpendam pemicu konflik salah satunya konflik budaya. Hal ini sangat berpengaruh bagaimana masyarakat Indonesia dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Banyaknya budaya dari suku yang berbeda-beda jika tanpa didasari toleransi yang tinggi dapat menimbulkan konflik antar budaya. Konflik yang terjadi akan terus berlangsung jika masyarakat tidak mendapatkan informasi dan pencerahan yang komprehensif mengenai budaya masing-masing serta pentingnya toleransi dan saling menghormati.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, sensus yang dilakukan pada tahun 2010 menyebut ada 1.128 suku di Indonesia yang tersebar di lebih dari 17 ribu pulau. Keberagaman ini menjadikan Indonesia salah satu negara dengan budaya paling kaya. Perubahan komposisi suku ini kerap menjadi potensial konflik sosial, ekonomi, maupun politik. Di sisi lain, keberagaman juga dapat memicu konflik bila tak dijumpai dengan baik. (www. bps.go.id, 20 Oktober 2015). Menurut Suparlan (2003) terdapat beberapa indikator yang menjadi penyebab konflik di Indonesia, sebagai berikut:

1. Corak bhinneka tunggal ika sebagai lambang negara yang menekankan komposisinya pada keanekaragaman sukubangsa dan kesukubangsaan, dan bukannya pada kebudayaan sebagai fokus keanekaragamannya dan keanekaragaman suku bangsa sebagai produk dari keanekaragaman kebudayaan tersebut.
2. Sistem nasional yang otoriter-militeristis dan korup dalam segala aspeknya sehingga terjadi berbagai bentuk pemanipulasian hukum dan SARA bagi berbagai kepentingan dan keuntungan oknum yang menyebabkan munculnya rasa ketidakadilan hanya dapat diatasi dalam perlindungan suku bangsa dan kesukubangsaan.

3. Corak masyarakatnya yang tidak demokratis walau diakui sebagai demokratis. Dalam pemerintahan Soeharto, konsep demokrasi diberi embel-embel seperti demokrasi Pancasila yang hanya menjadi angan-angan karena tidak operasional. Karena itu, demokrasi tidak menjadi ideologi dalam pengertian yang sebenarnya karena hanya *lip-service* saja.

Informasi mengenai budaya masing-masing suku yang ada, peristiwa di sekitar masyarakat dapat didapatkan di media massa. Media massa merupakan salah satu alat dalam proses komunikasi massa, karena media massa mampu menjangkau khalayak yang lebih luas dan relatif lebih banyak, heterogen, anonim, pesannya bersifat abstrak dan terpecah. Media massa sendiri dalam kajian komunikasi massa sering dipahami sebagai perangkat-perangkat yang diorganisir untuk berkomunikasi secara terbuka dan pada situasi yang berjarak kepada khalayak luas dalam waktu yang relatif singkat Media massa adalah media komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara massa dan dapat diakses oleh masyarakat secara massal (Bungin, 2006).

Beberapa tahun terakhir, peristiwa konflik yang terjadi di masyarakat sering terjadi. Peristiwa konflik yang terjadi akan selalu ada media yang meliput, karena isu ini memang “seksi” bagi insan pers. Peristiwa yang mengandung konflik adalah salah satu peristiwa yang dianggap layak untuk dijadikan sebuah berita. Konflik dianggap memiliki nilai berita yang termasuk tinggi karena biasanya menimbulkan kerugian atau korban (Ishwara, 2011). Hal tersebut dapat dilihat dalam peperangan, perkelahian atau tawuran, kerusuhan pembunuhan, budaya atau perdebatan yang terkait dengan isu-isu lainnya seperti ekonomi, agama, politik, kemanusiaan, budaya maupun olahraga.

Berdasarkan data yang dirilis Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015, pengelompokan isu konflik di tahun 2013, 2014 dan 2015 (medio kuartal Januari s/d April) diantaranya sebagai berikut: Tahun 2013 total telah terjadi 92 peristiwa konflik, diantaranya bentrok antar warga berjumlah 37 kasus, isu keamanan 16 kasus, isu Suku, Agama, Ras Antar golongan (SARA) 9 kasus, konflik kesenjangan sosial 2 kasus, konflik pada institusi pendidikan 2 kasus, konflik ORMAS 6

Bend Abidin Santosa

kasus, sengketa lahan 11 kasus, serta eksekusi politik 9 kasus. Sedangkan di tahun 2014 total jumlah konflik 83 kasus dengan rincian bentrok antar warga berjumlah 40 kasus, isu keamanan 20 kasus, isu SARA 1 kasus, konflik pada institusi pendidikan 1 kasus, konflik ORMAS 3 kasus, sengketa lahan 14 kasus, eksekusi konflik politik 4 kasus. Terakhir, di tahun 2015 (Medio Kuartal/ Jan s/d April) total jumlah konflik yang terjadi 26 kasus, dengan rincian bentrok antar warga berjumlah 8 kasus, isu keamanan 9 kasus, isu SARA, konflik ORMAS 1 kasus, sengketa lahan 6 kasus, dan terakhir konflik karena eksekusi politik berjumlah 2 kasus. ([kesbangpol.kemendagri.go.id](http://kesbangpol.kemendagri.go.id)).

Beberapa konflik yang terjadi di Indonesia bersumber karena perbedaan budaya. Konflik itu tak hanya menelan korban materi namun juga menghilangkan nyawa ratusan orang. Beberapa konflik agama dan budaya yang pernah terjadi antara lain, (1) Tragedi Sampit. Tragedi ini bermula dari konflik antara kelompok etnis Dayak dan Madura yang terjadi di Sampit, Kalimantan Tengah yang terjadi pada tahun 2001 dan diperkirakan korban jiwa mencapai angka 469 orang. (2) Konflik Maluku. Konflik ini adalah konflik kekerasan dengan latar belakang perbedaan agama yakni antara kelompok Islam dan Kristen. Konflik Maluku disebut menelan korban terbanyak yakni sekitar 8-9 ribu orang tewas. Selain itu, lebih dari 29 ribu rumah terbakar, serta 45 masjid, 47 gereja, 719 toko, 38 gedung pemerintahan, dan 4 bank hancur. (3) Konflik 1998. Krisis ekonomi berujung menjadi konflik sosial dan budaya pada penghujung Orde Baru. Jatuhnya Soeharto ditandai dengan merebaknya kerusuhan di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kerusuhan tersebut, banyak toko dan perusahaan dihancurkan massa yang mengamuk. Sasaran utama adalah properti milik warga etnis Tionghoa. ([Tempo.co](http://Tempo.co), 21 Mei 2015).

Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 21 Mei sebagai Hari Dialog dan Keberagaman sejak 2002. Peringatan hari ini berawal saat UNESCO mengeluarkan Deklarasi Universal tentang Keberagaman Budaya. Melalui Resolusi Nomor 57/249, ditetapkanlah 21 Mei sebagai hari merayakan keberagaman di seluruh dunia. PBB mencatat sebanyak 75 persen dari konflik besar yang terjadi di dunia saat ini berakar pada

dimensi budaya. PBB pun mencanangkan dialog untuk menjembatani budaya demi menciptakan perdamaian. (Tempo.co, 2015).

Selain konflik-konflik yang telah disebutkan di atas, beberapa contoh kasus konflik yang terjadi beberapa bulan terakhir ini antara lain, konflik tawuran antar pemuda beda suku di Yogyakarta, konflik antar suku di Kabupaten Timika, Papua, konflik antara Suku Tidung dan Suku Bugis di Tarakan, Kalimantan Timur, Konflik budaya dan agama di Tanjungbalai Sumatera Utara dan lain sebagainya. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan, bangsa Indonesia saat ini sedang menghadapi krisis budaya. Tanpa segera ditegakkannya upaya membentuk secara tegas identitas nasional dan kesadaran nasional, maka bangsa ini akan menghadapi kehancuran. Sudah merupakan kewajiban generasi saat ini sebagai anak bangsa untuk mempertahankan budaya yang baik dengan semangat ke-Bhinneka-an menuju bangsa yang abadi, luhur, makmur dan bermartabat. Membangun kebudayaan nasional Indonesia haruslah mengarah kepada suatu strategi kebudayaan untuk dapat menjawab pertanyaan akan kita jadikan seperti apa bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia yang pluralistik merupakan kenyataan yang harus dilihat sebagai aset nasional, bukan resiko atau beban. Rakyat adalah potensi nasional yang harus diberdayakan, ditingkatkan potensi dan produktivitas fisik, mental, dan kulturalnya. (kesbangpol.kemendagri.go.id, 1 Agustus 2016).

Budaya merupakan sehimpunan nilai-nilai yang oleh masyarakat pendukungnya dijadikan acuan bagi perilaku warganya, dalam merespon berbagai gejala dan peristiwa kehidupan. Acuan itu berupa nilai-nilai, kebenaran, keindahan, keadilan, kemanusiaan, kebajikan. Di sisi lain, nilai-nilai tersebut kemudian mewujudkan dalam bentuk peradaban, dimana terbangun norma-norma yang akan dijadikan tolok ukur bagi kepantasan perilaku warga masyarakat yang bersangkutan. Penjabaran nilai kebudayaan menjadi norma peradaban dapat dipandang sebagai pengalihan dan sesuatu yang *transenden* menjadi sesuatu yang *immanen*.

Budaya mempunyai karakter dinamis dan berkembang dalam diri masyarakat. Karena proses yang bersifat inheren tersebut maka bisa saja terjadi suatu saat kita akan terkaget-kaget dengan apa yang terjadi. Dan budaya itu tidak akan mudah, untuk tidak mengatakan mustahil, diputar

kembali agar kembali pada kondisi semula, seperti yang diharapkan. Sedangkan konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok), yang memiliki atau merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan (Fisher, 2000).

Menurut Alo Liliweri dalam Bukunya Prasangka dan Konflik (2005) konflik merupakan bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok karena mereka yang terlibat memiliki perbedaan sikap, kepercayaan, nilai atau kebutuhan. Konflik juga dapat diartikan hubungan pertentangan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki, sasaran-sasaran tertentu namun diliputi pemikiran, perasaan atau perbuatan yang tidak sejalan. Sedangkan menurut Hugh Miall (2002) konflik adalah aspek intrinsik dan tidak mungkin dihindarkan dalam perubahan sosial serta sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai, dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang penting ditimbulkan oleh perubahan sosial yang muncul bertentangan dengan hambatan yang di wariskan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka konflik merupakan aspek intrinsik yang tidak mungkin dihindari serta ekspresi heterogenitas yang di timbulkan oleh perubahan sosial yang di wariskan.

Tiga faktor dasar penyebab konflik menurut LR Pandy yaitu: 1) berlomba dalam memanfaatkan sumber langka (*competition for scarce resources*). 2) Dorongan dalam memperoleh otonomi (*drives for outonomy*). 3) Perbedaan di dalam mencapai tujuan tertentu (*disvergence of sub unit goals*). Sedangkan Leopold Van Wiese dan Howard Backer mencatat beberapa sebab akar-akar konflik, antara lain, perbedaan orang perorang yang terkait dengan pendidikan dan perasaan, perbedaan kebudayaan yang berkait dengan pola-pola kebudayaan, pembentukan dan perkembangan kepribadian, pola-pola pendirian, perbedaan kepentingan dan terakhir yakni perubahan sosial. (Sumarno, 2000).

Menurut Fisher (2000) konflik berubah setiap saat, melalui berbagai tahap aktivitas, intensitas, ketegangan, dan kekerasan yang berbeda. Tahap tahap konflik terdiri dari:

- Pertama, prakonflik. Merupakan periode dimana terdapat ketidak-sesuaian sasaran diantara dua pihak atau lebih sehingga timbul konflik.
- Dua, konfrontasi. Pada tahap ini konflik menjadi semakin terbuka. Hubungan di antara kedua pihak menjadi sangat tegang, mengarah pada polarisasi di antara para pendukung di masing-masing pihak.
- Tiga, krisis. Ini merupakan puncak krisis, ketika ketegangan dan/atau kekerasan terjadi paling hebat. Komunikasi normal di antara kedua pihak kemungkinan putus. Pernyataan-pernyataan umum cenderung menuduh dan menentang pihak-pihak lainnya.
- Empat, akibat. Pada tahap ini, tingkat ketegangan, konfrontasi dan kekerasan pada tahap ini agak menurun, dengan kemungkinan adanya penyelesaian.
- Lima, pascakonflik. Situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah ke lebih normal di antara kedua pihak. Namun jika isu-isu dan masalah-masalah penyebab pertentangan antara dua pihak tidak diatasi dengan baik, tahap ini sering kembali lagi menjadi situasi prakonflik.

Dalam arena publik, berbagai isu maupun permasalahan sosial seperti kekerasan dan konflik selalu menjadi konsumsi publik yang disajikan dengan berbagai perspektif oleh media-media yang meliput. Media menjadi bukan hanya semata deretan huruf maupun gambar tanpa makna, lebih dari itu, ia pun bertindak sebagai pembawa pesan. Tidak hanya sebagai medium, media juga dapat menempatkan diri sebagai pelaku dalam mendefinisikan realitas sosial dan memilih isu apa yang dianggap penting dan relevan. Fenomena ini dapat kita lihat secara kasat mata dengan makin beragam dan canggihnya industri media komunikasi dengan sajian berbagai macam informasi yang melimpah ruah. Media mengalami perubahan karakter mengikuti perubahan politik yang terjadi di negara ini. Sebagai salah satu kekuatan sosial, media tidak lagi hanya menyampaikan realitas, namun bekerja berdasarkan

kecenderungan, kepentingan, dan keberpihakan yang dianggapnya penting.

Di era reformasi, media menyajikan produk-produk jurnalistiknya dengan cara yang lebih lugas dan terang-terangan. Media semakin berani menulis dan membangun sebuah realitas sosial di luar sumber-sumber formal kekuasaan. Kondisi ini juga mengakibatkan media mampu mempengaruhi opini publik dengan framing terhadap sebuah pemberitaan. Analisis framing merupakan suatu pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif yang digunakan wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Perspektif itu akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak dibawa kemana berita itu.

Analisis framing digunakan untuk mengetahui bagaimana realitas dibingkai oleh media. Dengan demikian, realitas sosial dipahami, dimaknai dan dikonstruksi dengan bentuk dan makna tertentu. Elemen-elemen tersebut bukan hanya bagian dari teknis jurnalistik melainkan menandakan bagaimana peristiwa dimaknai dan ditampilkan. Ada dua esensi utama dari analisis framing yaitu, pertama, bagaimana peristiwa dimaknai. Ini berhubungan dengan bagian mana yang diliput dan mana yang tidak diliput. Kedua, bagaimana fakta ditulis. Aspek ini berhubungan dengan pemakaian fakta, kalimat dan gambar untuk mendukung gagasan. (Fachrul, 2015). Berita dalam pandangan konstruksi sosial, bukan merupakan peristiwa atau fakta dalam arti yang riil. Di sini realitas bukan hanya dioper begitu saja sebagai berita namun, ia adalah produk interaksi antara wartawan dengan fakta. Dalam proses internalisasi, wartawan dilanda oleh realitas. Realitas diamati oleh wartawan dan diserap dalam kesadaran wartawan. Dalam proses eksternalisasi, wartawan menceburkan dirinya untuk memaknai realitas. Konsepsi tentang fakta diekspresikan untuk melihat realitas. Hasil dari berita adalah produk dari proses interaksi dan dialektika tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan media dalam melakukan analisis framing yang menjadi asumsi dasar bahwa media massa merupakan sebuah alternatif solusi yang mampu berperan sebagai sarana alternative pencegah konflik budaya dan

kekerasan. Di era kebebasan ini, tidak ada lagi syarat ketat dalam mengelola dan menerbitkan media massa seperti yang terjadi di masa orde baru sehingga siapa yang memiliki modal dan kemampuan berhak mengelola penerbitan media massa. Pemberitaan oleh media menjadi subjektif, karena “isi” media dapat dikonstruksi oleh pemilik dengan beberapa penonjolan dalam sudut pandang tertentu. Media dapat menjadi komunikator yang “memainkan” isi berita sehingga isi berita dapat dikontrol oleh media massa. Hal ini memang menjadikan isi berita seperti dua mata pisau. Dapat kita ambil contoh dalam sebuah peristiwa konflik. Media massa dapat memberitakan konflik tersebut secara berimbang dengan prinsip “jurnalisme damai” sehingga isi berita yang disampaikan dapat meredam konflik. Namun di sisi lain, media massapun juga dapat menggunakan kekuasaannya dengan prinsip “jurnalisme perang” dengan memberitakan konflik tersebut secara “membabi buta” tanpa memperhatikan norma-norma budaya yang ada sehingga isi berita dimaksud malah memperparah sebuah konflik yang terjadi di masyarakat.

Penelitian ini juga didasarkan pada Teori Agenda Setting yang dikenalkan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw yang pada prinsipnya media massa membentuk persepsi khalayak tentang apa yang dianggap penting oleh media dengan teknik pemilihan dan penonjolan, media memberikan penekanan tentang isu yang lebih penting untuk disajikan bagi khalayak. Media mungkin tidak selalu berhasil menginformasikan kepada publik “hal apa yang dipikirkan”, namun berhasil memberitahukan audiencenya “tentang apa yang harus dipikirkan”. Intinya, media massa mempunyai kemampuan untuk memindahkan wacana dalam agenda pemberitaan kepada agenda publik. Kedua ahli tersebut percaya bahwa sisi yang digunakan pada teori ini untuk mengkaji media yaitu melihat kekuatan dari media dalam mempengaruhi opini publik tentang sesuatu peristiwa. (Griffin, 2012). Hal inilah yang membuat media massa mempunyai power untuk mengkonstruksi nilai-nilai budaya dalam sebuah berita agar berita yang diproduksi mampu meredam sebuah konflik atau malah sebaliknya.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dengan penggambaran dan perincian terhadap penelitian

diharapkan dapat mengungkapkan secara jelas data-data yang mendukung tentang bagaimana peran media dalam situasi konflik. Metode deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta objektivitas yang tampak atau sebagaimana adanya (*dasein*). Dalam usaha mendeskripsikan fakta itu pada tahap pertama tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang diteliti agar jelas kondisinya sehingga dapat diketahui apakah media menjadi sebuah solusi yang berperan sebagai konstruksi atas realita atau sarana pencegah konflik. Jenis penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang membuat gambaran mengenai kejadian untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. (Kriyantono, 2014).

Dalam kajian praktis, penelitian ini berusaha untuk mengetahui bahwa media seharusnya dipandang sebagai sebuah intitusi yang bebas dari nilai dan menyampaikan realitas secara apa adanya. Namun, juga tidak dapat dipungkiri bahwa media saat ini merupakan sebuah institusi yang mempunyai berbagai macam kepentingan yang dalam mencapai kepentingan itu melakukan berbagai macam konstruksi realitas. Sedangkan secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi disiplin ilmu komunikasi budaya. Penulis ingin mendapatkan data-data yang terkait hubungan antara fenomena yang diteliti, yaitu pengaruh pemberitaan media, dan hubungannya dengan situasi konflik.

### **Kajian Kritis**

Peran media massa dewasa ini berkembang dengan pesat. Media tidak hanya sebagai kanal pembawa informasi, tetapi sudah berkembang sebagai pusat informasi itu sendiri. Perkembangan media di era teknologi informasi ini memungkinkan semua lapisan masyarakat mengakses informasi secara bebas dan sangat terbuka. Kondisi demikian memungkinkan pemahaman yang berbeda dari masing-masing komunikasi tersebut.

Peran media massa dalam kehidupan sosial, terutama dalam masyarakat modern menurut McQuail dalam bukunya *Mass Communication Theories* (2000), ada enam perspektif dalam hal melihat peran media.

1. Media massa sebagai *window on event and experience*. Media dipandang sebagai jendela yang memungkinkan khalayak melihat apa yang sedang terjadi di luar sana. Atau media merupakan sarana belajar untuk mengetahui berbagai peristiwa.
2. Media juga sering dianggap sebagai *a mirror of event in society and the world, implying a faithful reflection*. Cermin berbagai peristiwa yang ada di masyarakat dan dunia, yang merefleksikan apa adanya. Karenanya para pengelola media sering merasa tidak “bersalah” jika isi media penuh dengan kekerasan, konflik, pornografi dan berbagai keburukan lain, karena memang menurut mereka faktanya demikian, media hanya sebagai refleksi fakta, terlepas dari suka atau tidak suka. Padahal sesungguhnya, angle, arah dan framing dari isi yang dianggap sebagai cermin realitas tersebut diputuskan oleh para profesional media, dan khalayak tidak sepenuhnya bebas untuk mengetahui apa yang mereka inginkan.
3. Memandang media massa sebagai filter, atau *gatekeeper* yang menyeleksi berbagai hal untuk diberi perhatian atau tidak. Media senantiasa memilih issue, informasi atau bentuk content yang lain berdasar standar para pengelolanya. Di sini khalayak “dipilihkan” oleh media tentang apa-apa yang layak diketahui dan mendapat perhatian.
4. Media massa acapkali pula dipandang sebagai *guide*, penunjuk jalan atau interpreter, yang menerjemahkan dan menunjukkan arah atas berbagai ketidakpastian, atau alternatif yang beragam
5. Melihat media massa sebagai forum untuk mempresentasikan berbagai informasi dan ide-ide kepada khalayak, sehingga memungkinkan terjadinya tanggapan dan umpan balik.
6. Media massa sebagai *interlocutor*, yang tidak hanya sekadar tempat berlalu lalangnya informasi, tetapi juga partner

komunikasi yang memungkinkan terjadinya komunikasi interaktif.

Singkatnya, semua itu ingin menunjukkan, peran media dalam kehidupan sosial bukan sekedar sarana diversion, pelepas ketegangan atau hiburan, tetapi isi dan informasi yang disajikan, mempunyai peran yang signifikan dalam proses sosial. Isi media massa merupakan konsumsi otak bagi khalayaknya, sehingga apa yang ada di media massa akan mempengaruhi realitas subjektif pelaku interaksi sosial. Gambaran tentang realitas yang dibentuk oleh isi media massa inilah yang nantinya mendasari respon dan sikap khalayak terhadap berbagai objek sosial dan budaya. Informasi yang salah dari media massa akan memunculkan gambaran yang salah pula terhadap objek tersebut. Karenanya media massa dituntut menyampaikan informasi secara akurat dan berkualitas. Kualitas informasi inilah yang merupakan tuntutan etis dan moral penyajian media massa.

### **Kekuatan dan Pengaruh Pemberitaan Media Massa dalam Konflik**

Di saat terjadi konflik, pers seharusnya memberikan informasi yang seimbang, sehat, serta menenangkan suasana dan bukannya malah memanas-manasi atau memprovokasi publik untuk ikut memperuncing sebuah konflik. Idealnya, pers atau media seharusnya menyediakan informasi yang jujur, jernih dan seluas mungkin mengenai apa yang layak dan perlu diketahui oleh masyarakat sehingga dapat membantu meredakan dan menyelesaikan konflik. Meskipun juga tidak dapat dipungkiri “kebanyakan” media masih saja memberitakan fakta-fakta terkait konflik dengan “membabi buta” dengan sedikit sekali filter yang digunakan.

Dalam memberitakan sebuah konflik, media massa seharusnya lebih menekankan pada penggunaan prinsip “*peace journalism/jurnalisme damai*” daripada “*war journalism/jurnalisme perang*”. Jurnalisme damai diartikan sebagai jurnalisme yang berdiri di atas nama kebenaran yang menolak propaganda dan kebohongan dimana kebenaran dilihat dari beragam sisi tidak hanya dari sisi “kita”. (Galtung

dalam Oktarianisa, 2009). Pengertian tersebut dapat ditafsirkan bahwa dalam menampilkan berita yang mengandung konflik, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik diberikan kesempatan untuk mengemukakan permasalahan dari sudut pandang mereka masing-masing sehingga tidak ada bias dan keberpihakan dari jurnalis maupun media massa yang menampilkan permasalahan tersebut. Adanya prinsip keadilan dan berimbang dalam penyajian berita konflik juga mencegah jurnalis dari tuduhan melakukan propaganda.

Hal ini dapat dicontohkan dengan beberapa headline dengan prinsip jurnalisme damai yang dapat meredam konflik misalnya, dalam konflik antar suku media memberikn judul beritanya “Warga Kwamki Lama Deklarasi Tolak Perang Suku” (liputan6.com, 10 Mei 2016), Anggota DPR minta penyelesaian konflik Tanjungbalai secara bijaksana (antaranews.com, 2 Agustus 2016), Tjahjo minta Pemprov Sumut cegah konflik di Tanjungbalai meluas (merdeka.com, 31 Juli 2016), Sutiyo Pastikan Konflik di Tanjungbalai Tak Meluas (tribunnews.com, 30 Juli 2016) dan sebagainya.

Sebaliknya, headline dengan prinsip jurnalisme perang yang hanya menampilkan akibat-akibat yang terjadi ataupun pernyataan yang semakin memperuncing konflik misalnya, Dua orang tewas dan 95 rumah dibakar di Tolikara (bbc.com, 26 April 2016), Konflik di Tolikara, 2 Tewas, 95 Rumah Terbakar (beritasatu.com, 24 April 2016), Selain Tanjung Balai, Medan Juga Rawan Konflik Sosial (okezone.com, 2 Agustus 2016) dan lain-lain.

Menurut Lynch & McGoldrick dalam Oktarianisa (2009) terdapat tiga hal yang paling penting dalam jurnalisme damai yaitu:

1. Menggunakan wawasan yang lebih luas dalam memandang dan menganalisa sebuah konflik dan mentransformasikannya sebagai konsep yang seimbang, adil dan akurat dalam melaporkan berita.
2. Membuat sebuah cara baru dalam memetakan sebuah hubungan di antara jurnalis, sumber, cerita yang mereka buat dan konsekuensi dari bentuk jurnalisme yang dipakai dimana ada intervensi etika dalam jurnalisme.

3. Membangun kesadaran atas pentingnya fokus pada anti kekerasan yang diimplementasikan pada kegiatan keseharian jurnalis baik reporter ataupun editor.

Peliputan berita konflik budaya dengan prinsip jurnalisme damai maupun jurnalisme perang yang merupakan lawannya mempunyai perbedaan-perbedaan yang menyolok dan cukup signifikan. Menurut Claire H Badaraco (2009) perbedaan antara peliputan dengan prinsip jurnalisme damai dan jurnalisme perang adalah sebagai berikut:

| Orientasi Pemberitaan Jurnalisme Damai   | Orientasi Pemberitaan Jurnalisme Perang   |
|--|---|
| Menelusuri unsur pada konflik, misalnya berapa pihak yang terlibat yang menjadi isu atau masalah yang diperdebatkan dengan perspektif mencari penyelesaian   | Hanya menyoroti daerah-daerah konflik, biasanya hanya melihat dua pihak yang bertikai dengan satu tujuan (kemenangan). Konflik direduksi menjadi sebuah perang yang tidak mungkin mencapai titik temu                     |
| Melihat waktu dan tempat konflik secara terbuka, tidak dibatasi oleh kejadian-kejadian yang baru berlangsung. Melihat sebab dan akibat diberbagai tempat dan waktu serta menelusuri sejarah konflik dan lain sebagainya. | Melihat waktu dan konflik secara tertutup, hanya menyoroti tempat-tepat kejadian. Melihat sebab dan akibat hanya sebagai peristiwa, seperti siapa yang pertama kali memulai konflik dan bagaimana pihak lain membahasnya. |
| Membuat konflik bersifat transparan  | Membuat konflik bersifat rahasia  |
| Memberi suara kepada semua pihak dengan empati dan pemahaman   | Menggunakan kerangka “kita-mereka” dan hanya menyuarakan “kita”   |
| Melihat konflik atau perang sebagai masalah dan melihat  | Melihat keberadaan mereka sebagai masalah dan selalu  |

|  |  |
|--|--|
| bentuk-bentuk lain dari konflik yang tidak menggunakan kekerasan   | menyoroti kemenangan atau kekalahan dari mereka yang terlibat konflik  |
| Melihat pihak-pihak yang berkonflik sebagai manusia terutama jika ada yang menggunakan senjata                                 | Menciptakan image tentang musuh yang biadab, terutama jika ada yang menggunakan senjata  |
| Proaktif, mencegah terjadinya perang, kekerasan, konflik tanpa harus menutupi konflik  | Reaktif, hanya membuat laporan atau berita ketika kekerasan terjadi  |
| Menyoroti akibat kekerasan yang tidak terlibat seperti trauma dan demam kemenangan, kehancuran struktur masyarakat dan budaya. | Hanya menyoroti akibat-akibat yang terlihat dari kekerasan seperti korban pembunuhan, luka-luka, kerusakan bangunan dan sebagainya |

Setidaknya, pemberitaan tentang sebuah konflik di media massa dapat membawa pengaruh pada dua hal. Pertama, pemberitaan media justru memperluas eskalasi konflik dan kedua, dapat membantu meredakan dan menyelesaikan konflik. Pendapat yang saling bertentangan diharapkan akan bermuara pada satu kesepakatan penyelesaian. Pendapat seperti ini walaupun masuk akal namun belum terbukti secara empiris yang dapat dijadikan pegangan untuk membenarkan asumsi tersebut. Hal ini dapat kita analisa tentang tugas-tugas seorang jurnalis di media massa. Pada dasarnya pekerjaan jurnalis media massa adalah mengkonstruksikan realitas, sebab media massa menceritakan peristiwa-peristiwa menjadi berita. Konstruksi realitas merupakan upaya memberikan gambaran atau menceritakan sebuah peristiwa, keadaan, atau benda. Isi media adalah hasil para pekerja pers mengkonstruksikan berbagai realitas yang dipilihnya (Sobur, 2009).

Informasi tentang krisis dan konflik banyak kita temukan di media massa. Tetapi dari segi kualitas hal itu belum menjamin perbaikan situasi konflik dan krisis yang berlangsung. Kebanyakan informasi tentang konflik yang tersaji di media massa hanya bersifat permukaan,

parsial, sepotong-potong, tidak proporsional, sebagian besar hanya menekankan aspek kekerasan dan konflik terbuka saja, bukan pada aspek situasi, akar masalah yang bisa mendukung perbaikan situasi dan perdamaian. Oleh karena itu seharusnya media massa dapat menjadi sumber informasi yang berimbang dengan memberitakan konflik secara komprehensif mengenai akar masalahnya guna mendukung resolusi konflik bukan hanya menampilkan gambar-gambar serta pemberitaan yang terlalu vulgar seperti darah, mayat bergelimpangan, pembakaran yang akhirnya malah memperparah konflik.

Idealnya suatu berita yang baik adalah berita yang ditulis berdasarkan fakta sesungguhnya. Tidak dikotori oleh kepentingan segelintir orang sehingga mendistorsi fakta tersebut. Namun dalam realita media sebagai ruang publik, kerap tidak bisa memerankan diri sebagai pihak yang netral. Media senantiasa terlibat dengan upaya merekonstruksi realitas sosial. Dengan berbagai alasan teknis, ekonomis, maupun ideologis, media massa selalu terlibat dalam penyajian realitas yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak mencerminkan realita sesungguhnya. Keterbatasan ruang dan waktu juga turut mendukung kebiasaan media untuk meringkaskan realitas berdasarkan “nilai berita”.

Prinsip berita yang berorientasi pada hal-hal yang menyimpang menyebabkan liputan peristiwa jarang bersifat utuh, melainkan hanya mencakup hal-hal yang menarik perhatian saja yang ditonjolkan. Berita juga sering dibuat berdasarkan semangat “laku-tidaknya berita itu dijual” Sejauh ini, bisa dikatakan media massa boleh dikatakan cenderung meliput berita konflik hanya pada aspek perilaku konfliknya saja atau aspek-aspek konflik yang kelihatan kasat mata. Misalnya perilaku membunuh, membantai kelompok tertentu, menembak, membakar, dan lain-lain. Berita-berita sensasional dan dramatis demikian sering menjadi liputan utama. Media seringkali juga menyajikan secara berlebihan aspek kekerasan dan konflik, misalnya sekian banyak tempat yang strategis rusak dibakar, jumlah korban yang terluka atau terbunuh, dan lain sebagainya.

Liputan yang ada di lapangan bukan pada keseluruhan fakta tentang dimensi-dimensi konflik yang ada, mencakup situasi konflik dan persepsi atau pandangan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik

sehingga informasi tentang konflik yang tersedia dalam dunia kita sekarang menjadi bersifat sangat permukaan (*superficial*) dan tidak proporsional (*out of proportion*). Sejauh ini telah umum diakui bahwa media massa seringkali menyajikan informasi tentang konflik secara permukaan dan sepotong-potong. Hanya aspek konflik yang paling mudah dilihat dan peristiwa konflik yang paling dramatis, yang mendapat perhatian terbesar untuk diliput. Aspek lain dari kekerasan, seperti situasi yang menjadi akar konflik dan persepsi berbagai pihak tentang konflik tidak mendapat perhatian berarti, meski hal itu sangat penting untuk diketahui publik.

Selain bersifat permukaan, liputan media massa dan laporan resmi pemerintah tentang konflik di Indonesia seringkali bias dan tidak proporsional. Bentuk bias dan ketidakproporsionalan liputan itu dapat berupa peliputan yang berlebihan tentang cakupan dan intensitas konflik yang tidak sesuai dengan tingkatan konflik yang nyata, atau sebaliknya. Untuk mengatasi masalah ini, terdapat beberapa alternatif solusi yang dapat dilakukan media massa seperti dikemukakan oleh Chang dalam Trijono (2002) antara lain, dengan menambah dan terus menerus membuka saluran/channel komunikasi sehingga arus informasi terus mengalir dan ketersediaan informasi bisa diperoleh secara memadai, meningkatkan kualitas informasi tentang konflik yang ada sehingga bisa diperoleh informasi yang bermakna dan berguna secara memadai bagi kepentingan publik secara luas dan memfokuskan pada penyajian informasi dan proses komunikasi yang mengarah pada isu-isu spesifik dari situasi konflik dan setiap dimensi krisis secara mendalam sehingga tidak memperluas dan semakin membuat ruwet interpretasi dan pemaknaan publik yang bisa semakin mengacaukan situasi krisis.

Perbaikan kualitas komunikasi dan informasi yang diliput media massa melalui berbagai upaya kampanye dan perluasan aktivitas komunikasi perdamaian atau jurnalisme damai dapat membantu perbaikan situasi konflik dan krisis yang terjadi sehingga dalam hal ini media massa dapat menjadi salah satu alternatif solusi dalam meredakan dan membantu menyelesaikan konflik yang sedang terjadi.

Selain itu, dibutuhkan sinergisitas yang konstruktif antara media massa, dewan pers, komisi penyiaran, pemerintah dan juga masyarakat

untuk terus mengkampanyekan setiap pemberitaan dan ekspos media yang edukatif, objektif, damai dan berorientasi pada peningkatan penguatan ketahanan sosial dalam rangka memperkuat jati diri dan identitas negara Indonesia.

### **Simpulan**

Konflik dapat terjadi di manapun kita berada, entah konflik budaya, ideologi, atau bahkan antar agama. Setiap dari manusia memiliki potensi konflik masing-masing. Semua ini tergantung individu masing-masing, bagaimana individu menerima stimulus yang ada, merespon dari kekuatan stimulus yang timbul oleh suatu kejadian yang dapat menyebabkan perubahan potensi konflik menjadi sebuah konflik yang berbahaya.

Konflik merupakan ancaman bagi keharmonisan kehidupan masyarakat bahkan ia menjadi ancaman bagi disintegrasi bangsa. Konsekuensi logis dari bangsa yang plural seperti Indonesia adalah tumbuh suburnya konflik horizontal di masyarakat. Media Massa merupakan sumber informasi yang paling berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat. Pengaruh media massa terhadap pola pikir masyarakat disebabkan karena media memiliki kemampuan menciptakan kesan/citra dan persepsi bahwa suatu berita yang ditampilkan lebih nyata dari realitasnya. Media massa merupakan filter atau gatekeeper yang menyeleksi berbagai hal terkait konflik budaya apakah pantas diberitakan ataupun tidak. Media senantiasa memilih isu, informasi atau bentuk *content* yang “dipilihkan” tentang apa-apa yang layak diketahui dan mendapat perhatian khalayak.

Media massa mempunyai kekuatan mengkonstruksi nilai-nilai dalam masyarakat. Misalnya melalui pemberitaan tentang dampak negatif konflik, komentar para ahli dan tokoh-tokoh masyarakat yang anti konflik serta tulisan-tulisan, gambar dan surat pembaca yang berisikan realitas yang dihadapi masyarakat dengan maraknya konflik, maka media dapat dengan cepat mengkonstruksikan masyarakat secara luas karena jangkauannya yang jauh.

Peran media dalam kehidupan sosial bukan sekedar sarana *diversion*, pelepas ketegangan atau hiburan, tetapi isi dan informasi yang

disajikan, mempunyai peran yang signifikan dalam proses sosial. Isi media massa merupakan konsumsi otak bagi khalayaknya, sehingga apa yang ada di media massa akan mempengaruhi realitas subjektif khalayak. Peranan media massa dalam konflik, antara lain, media dapat *memblow up* realita secara komprehensif yang menjadi sebuah isu konflik sehingga dimensi isu menjadi transparan, media mampu “menenggelamkan” isu konflik terutama apabila menyangkut kepentingan publik yang luas maupun kepentingan media itu sendiri, media sebagai conflict resolution/mediator dengan menampilkan isu dari berbagai perspektif serta mengarahkan pihak yang bertikai pada penyelesaian konflik dan media berfungsi sebagai pembentuk opini publik karena mempunyai kekuatan mengkonstruksi masyarakat dalam menyampaikan berbagai informasi dan pembahasan mengenai moral, etika serta nilai budaya kepada masyarakat luas.

Namun, yang lebih penting adalah pengelola media seharusnya dapat memposisikan dirinya agar selalu memberitakan sebuah konflik dengan berimbang dengan menggunakan prinsip-prinsip jurnalisme damai dan bukan jurnalisme perang. Di samping itu, tentu saja partisipasi dari masyarakat untuk bersama-sama mencegah konflik dengan menggunakan cara-cara yang beradab dan mengedepankan musyawarah dan kekeluargaan.

Media massa memiliki peran yang penting dan strategis dalam menjaga dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI. Dalam era kebebasan pers, media bisa berimplikasi positif maupun negatif. Kesadaran untuk memomorsatukan kepentingan bangsa dan negara dari para pelaku media dalam setiap tugas jurnalistiknya akan sangat berpengaruh terhadap perjalanan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Media massa harus mampu menjaga integrasi bangsa dan keutuhan NKRI dengan memelihara wawasan kebangsaan, menghargai pluralitas, menyemarakkan demokrasi, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Manifestasinya adalah kerja jurnalistik menonjolkan hal-hal yang merekatkan persatuan, menghormati perbedaan, mengintensifkan dialog, mendorong kreativitas, tidak memberi tempat pada hal-hal yang memicu konflik.

## Referensi

- Aswika, Y. (2016, Agustus 2). Anggota DPR minta penyelesaian konflik Tanjungbalai secara bijaksana. *Antaraneews.com*. Diakses dari <http://www.antaraneews.com/berita/576490/anggota-dpr-minta-penyelesaian-konflik-tanjungbalai-secara-bijaksana>
- Badaraco, C., H., & Blakeman, K. (2009). *Journal for The Study of Peace and Conflict 2009-2010 Annual Edition*. Diakses dari <http://proquest.umi.com/pqdweb?index=2&did=2362014051&SrchMode=1&sid=2&Fmt=6&VInst=PROD&VType=PQD&ROT=309&VName=PQD&TS=1316665141&clientId=97884>.
- Bungin, B. (2006). *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dua orang tewas dan 95 rumah dibakar di Tolikara. (2016, April 26). *BBC*. Diakses dari [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/04/1604\\_24\\_indonesia\\_tolikara\\_papua\\_rusuh](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/1604_24_indonesia_tolikara_papua_rusuh)
- Fachrul Nurhadi, Z. (2015). *Teori-Teori Komunikasi. Teori Komunikasi dalam Perspektif Penelitian Kualitatif*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia
- Fisher S., dkk. (2000). *Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi Bertindak*. Jakarta: The British Council Indonesia.
- Griffin, Em. (2012). *A First Look At Communcation Theory*. (8th ed). New York: The McGraw-Hill Companies.
- Ishwara, L. (2011). *Jurnalisme Dasar*. Jakarta: Kompas.
- Isidorus, R. (2016, April 24). Konflik di Tolikara, 2 Tewas, 95 Rumah Terbakar. *Berita Satu.com*. Diakses dari : <http://www.beritasatu.com/nusantara/361691-konflik-di-tolikara-2-tewas-95-rumah-terbakar.html>
- Janur, K (2016, Mei 10). Warga Kwamki Lama Deklarasi Tolak Perang Suku. *liputan6.com*. Diakses dari : <http://regional.liputan6.com/read/2503096/warga-kwamki-lama-deklarasi-tolak-perang-suku>

- Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri. (2015). *Perbandingan Peristiwa Konflik Sosial Berdasarkan Pengelompokan Isu/Pola Konflik*. Diakses dari :  
[http://kesbangpol.kemendagri.go.id/files\\_uploads/Data\\_Konflik.pdf](http://kesbangpol.kemendagri.go.id/files_uploads/Data_Konflik.pdf)
- Konflik yang Dipicu Keberagaman Budaya Indonesia. (2015, 21 Mei). *Tempo.co*. diakses dari :  
<http://m.tempo.co/read/news/2015/05/21/078668047/konflik-yang-dipicu-keberagaman-budaya-indonesia>
- Kriyantono, R. (2014). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Liliweri, A. (2005). *Prasangka dan Konflik. Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multi Kultur*. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta.
- McQuail, D. (2000). *Mass Communication Theories*. (4th ed). London: Sage Publication
- Megawati, A. (2016, Juli 31). Tjahjo minta Pemprov Sumut cegah konflik di Tanjungbalai meluas. *Merdeka.com*. Diakses dari  
<https://www.merdeka.com/peristiwa/tjahjo-minta-pemprov-sumut-cegah-konflik-di-tanjungbalai-meluas.html>
- Miall, H., dkk. (2002). *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola, dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*. (Edisi terjemahan). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Oktarianisa, S. (2009). Pandangan Jurnalis TV Mengenai Aplikasi Konsep Jurnalisme Damai Pada Berita Perang di Televisi Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia*, 7(3), September-Desember: 543-545.
- Siregar, A.,W. (2016, Agustus 1). Selain Tanjung Balai, Medan Juga Rawan Konflik Sosial. *Okezone News*. Diakses dari  
<http://news.okezone.com/read/2016/08/01/340/1452453/selain-tanjung-balai-medan-juga-rawan-konflik-sosial>
- Siregar, I., A. (2016). Mendagri: Yang Kita Hadapi Saat ini Adalah Krisis Budaya. *Zonalima.com*. Diakses dari :  
<http://www.zonalima.com/artikel/9633/Mendagri-Yang-Kita-Hadapi-Saat-ini-Adalah-Krisis-Budaya/>

Bend Abidin Santosa

- Sobur, A. (2009). *Semiotika Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sumarno, Karimah, K., dan Damayanti NA. (2000). *Filsafat dan Etika Komunikasi*, Jakarta: Universitas Terbuka Press.
- Suparlan, P. (2003). Bhinneka Tunggal Ika; Keanekaragaman Sukubangsa atau Kebudayaan?. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 72.
- Susetio, J. (2016, Juli 30). Sutiyoso Pastikan Konflik di Tanjungbalai Tak Meluas, *Tribunnews.com*. Diakses dari : <http://medan.tribunnews.com/2016/07/30/sutiyoso-pastikan-konflik-di-tanjungbalai-tak-meluas>
- Trijono, L. (2002). Peran Komunikasi dalam Konflik dan Untuk Perdamaian. Dalam Ispandriarno L., Hanitzsch T., & Loeffelholz M (Penyunting), *Media-Militer-Konflik, Crisis Communication: Perspektif Indonesia dan Internasional. Friedrich Ebert Stiftung*. Jakarta: Galang Pers.